



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2009

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2009.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006-2010 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2008.

2. Hasil Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Masa Persidangan I Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2009 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2009 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
- BAB III Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Ringkasan Pendanaan
- BAB IV Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009
- BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- BAB VI Kaidah Pelaksanaan
- BAB VII Penutup

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2009 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2009 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2009

Pasal 5

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dianggarkan setelah ditetapkan RKPD Tahun 2009 dan belum tercantum dalam RKPD Tahun 2009. menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Tahun 2009

Pasal 6

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 21 Juli 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI E NOMOR 10

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 17 Tahun 2008
Tanggal : 21 Juli 2008

NASKAH
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	j
DAFTAR TABEL.....	l'''
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	M
1.1. Umum.....	1-1
1.2. Dasar Hukum.....	1-2
1.3. Visi Misi.....	1-2
1.3. Sistematika..... *	1-3
BAB II EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2.1. Kinerja Makro Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-1
2.1.2. Aspek Pelayanan Umum.....	II-3
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-7
2.2. Kinerja Mikro (SKPD pengelola kegiatan).....	II-9
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	III-1
DAN RINGKASAN PENDANAAN	
3.1. Kondisi Ekonomi Regional.....	III-1
3.2. Kondisi Ekonomi Kabupaten Purworejo.....	III-2
3.3. Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal.....	III 4
3.4. Tantangan Utama.....	III-6
3.5. Arah Kebijakan Ekonomi Makro.....	III-7
3.6. Sasaran Pembangunan Ekonomi Tahun 2009.....	III-8
3.7. Arah Kebijakan Anggaran Tahun 2009.....	III-8
3.7.1. Sumber-sumber Pendapatan.....	III-9
3.7.2. Belanja Daerah.....	111-10

BAB IV	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009.....	IV-1
3.1.	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2009.....	IV-1
3.2.	Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009.....	IV-1
3.3.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2009.....	IV-2
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	V-I
	TAHUN 2009	
4.1.	Program Non Urusan.....	V-I
4.2.	Program Urusan Wajib.....	V-I
4.3.	Program Urusan Pilihan.....	V-9
4.4.	Program prioritas.....	V-II
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN.....	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perkembangan Pelayanan Bidang Kesehatan..... Kabupaten Purworejo Tahun 2005 s.d 2007	
Tabel 2.2 Kondisi Saluran Irigasi, Bendung dan Bangunan Air.....IH? di Kabupaten Purworejo Tahun 2007	
Tabel 2.3 Penduduk Usia Produktif, Tidak Produktif Dan Angka.....II-g Ketergantungan di Kabupaten Purworejo Th. 2005 s.d 2006	
Tabel 2.4 Realisasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.....I.H.O. Kabupaten Purworejo Tahun 2007	
Tabel 3.1 APBD Kab.Purworejo Th.2007 dan 2008.....IJI-IO. Serta estimasi Tahun 2009	
Tabel 3.2 Ringkasan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan.....III-I.I Tahun 2009 Berdasar Urusan	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Pertumbuhan PDRB dan Inflasi Kabupaten Purworejo.....II-.1 Tahun 2005 s.d 2007
Gambar 2.2	PDRB per Kapita Kab.Purworejo Tahun 2004 s.d 2007.....II-2
Gambar 2.3	Ketimpangan Pendapatan di Kab.Purworejo.....11-2
Gambar 2.4	Indeks Ketimpangan Regional Kab.Purworejo.....II-2 Tahun 2005 s.d 2006
Gambar 2.5	Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah.....II-3 Kab.Purworejo Tahun 2005 s.d 2006
Gambar 2.6	Rasio Siswa per Guru dan Rasio Siswa per Sekolah.....II-3.
Gambar 2.7	Kondisi Ruang Kelas SD/MI, SLTP dan SLTA.....II-4 Kabupaten Purworejo Tahun 2007
Gambar 2.8	Kondisi Jalan Kab. Purworejo Tahun 2007.....II-6
Gambar 2.9	Struktur Ekonomi Kab. Purworejo.....II-7
Gambar 2.10	Produktivitas sektor PDRB Kab.Purworejo.....II-7 Tahun 2005 s.d 2006
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kab.Purworejo Th. 2001 s.d 2007.....JJJ-2
Gambar 3.2	PDRB Kab.Purworejo Th. 2001 s.d 2007.....111-2
Gambar 3.3	Perkembangan Tingkat Inflasi Kab.Purworejo.....III-.3 Tahun 2004 s.d 2007
Gambar 3.4	PDRB per Kapita Kb.Purworejo Menurut Harga berlaku.....1.11-3 Dan Harga Konstan Tahun 2000
Gambar 3.5	Anggaran Pendapatan Daerah Kab.Purworejo.....JJI-9. Tahun 2007 dan 2008 serta Estimasi Tahun 2009

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Rencana pembangunan daerah Tahun 2009 adalah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo. Program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2009 diarahkan kepada penyelesaian pencapaian-pencapaian tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan tahun RKPD, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Prioritas pembangunan tahunan disusun berdasarkan kriteria :

- memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan;
- memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;
- realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program . Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

1.2 Dasar hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, -Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006-2010 .

1.3. Visi dan Misi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten

Purworejo Tahun 2006-2010, maka visi pembangunan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut : " Menuju masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera dengan meningkatkan kemandirian serta daya saing, melalui penyelenggaraan pembangunan daerah yang aspiratif, dengan dukungan birokrasi profesional, dan bersih dari korupsi serta peran serta aktif sektor swasta dan masyarakat."

Sedangkan Misi Pembangunan kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan politik melalui pemberdayaan pemerintahan desa dan penjangkauan aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan mekanisme politik yang sehat dan dinamis;
2. Meningkatkan keberdayaan pemerintahan desa sebagai perwujudan otonomi pemerintah desa melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat melalui penguatan keterkaitan sektoral, regional dan global;
4. Meningkatkan profesionalisme birokrasi melalui upaya peningkatan kemampuan pegawai serta peningkatan efektifitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance);
5. Meningkatkan pengawasan untuk lebih menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

1.4. Sistematika

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Bab III Kerangka Ekonomi Makro Daerah beserta kerangka pendanaan

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Bab VI Kaidah Pelaksanaan

Bab VII Penutup

BAB II

EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Evaluasi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan. Bersama-sama dengan perencanaan menjadi komponen dalam siklus pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi adalah merupakan review atas segala hal yang mengarah pada sebuah keberhasilan maupun kegagalan atas yang telah dikerjakan. Menjadi sangat esensial keberadaannya seandainya dapat menjadi titik tolak pelaksanaan pembangunan periode berikutnya.

Penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun ketiga menjelang tahun keempat pelaksanaan RPJMD menghasilkan berbagai dimensi pencapaian. Pokok-pokok hasil capaian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purworejo disajikan dalam 2 kelompok besar yaitu 1) kinerja makro daerah serta 2) kinerja mikro yaitu kinerja SKPD pengelola kegiatan.

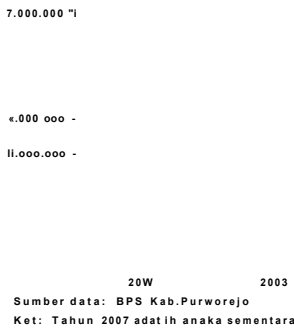
2.1. Kinerja Makro Daerah

Kinerja Makro Daerah memberikan gambaran tentang hasil-hasil pembangunan daerah yang mencakup 3 aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek kesejahteraan masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat secara indikatif tampak dalam pendapatan perkapitanya dan beberapa ukuran-ukuran untuk aspek distribusinya seperti Gini Ratio maupun Indek Ketimpangan Wilayah

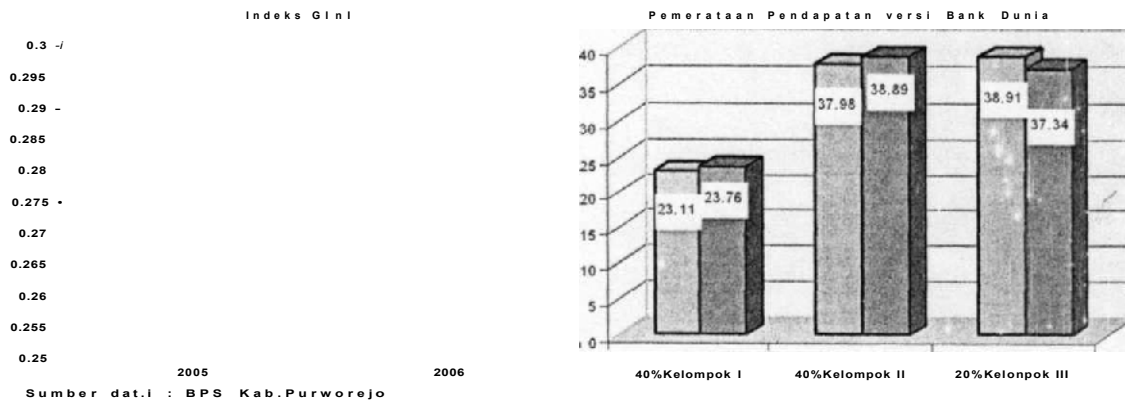
Gambar 2.2 PDRB Perkapita Kab.Purworejo Tahun 2004 ad 2007



Pendapatan perkapita meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2007 mencapai angka Rp 6.526.060,00. Pada tahun yang sama angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 5,2%.

Ketimpangan pendapatan salah satunya dapat ditinjau melalui nilai gini ratio. Nilai gini ratio dari tahun 2005 hingga 2006 tergolong rendah (dibawah 0,35%) serta berkecenderungan menurun. Sementara apabila menggunakan ukuran ketimpangan menurut Bank Dunia maka diperoleh kondisi yang

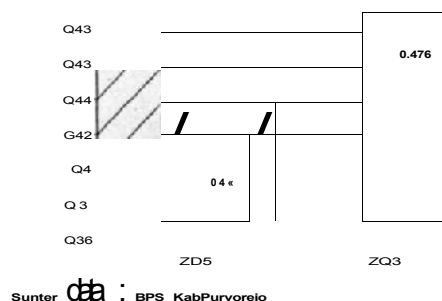
Gambar 2.3 Ketimpangan Pendapatan di Kab.Purworejo



menunjukkan bahwa 40% penduduk kelompok pendapatan terendah menerima lebih dari 12% total pendapatan (kondisi tahun 2005 sampai dengan 2006)

Ketimpangan wilayah rendah (mendekati nol) namun mempunyai kecenderungan meningkat, tampak dalam angka indeks Williamson (0,409 tahun 2005 menjadi 0,476 tahun 2006). Angka ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan antar wilayah di Kab.Purworejo (yang secara relatif berdasarkan pada PDRB perkapita masing-masing Kecamatan)

Gambar 2.4 Indeks Ketimpangan Regional kab.Purworejo Th. 2005 s.d 2006

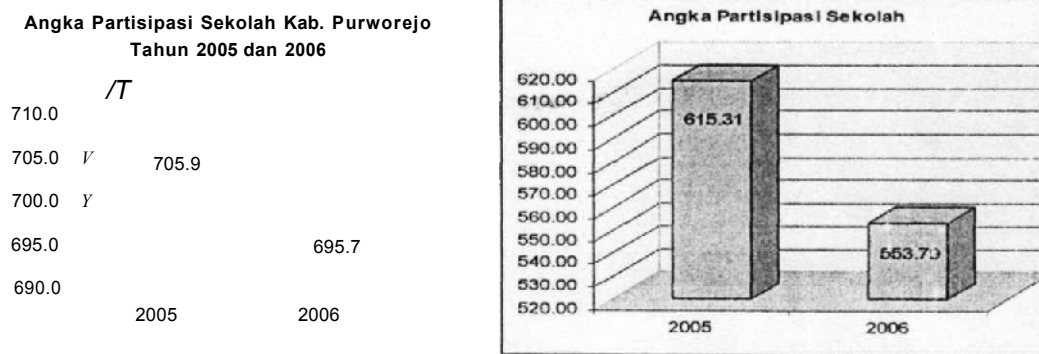


2.1.2. Aspek pelayanan umum

Aspek pelayanan umum akan ditinjau dari 3 pelayanan dasar daerah yaitu pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta prasarana wilayah.

Hasil pelayanan dasar bidang pendidikan secara umum mengalami fluktuasi. Angka Partisipasi Sekolah menurun pada tahun 2006 baik pada pendidikan dasar maupun menengah.

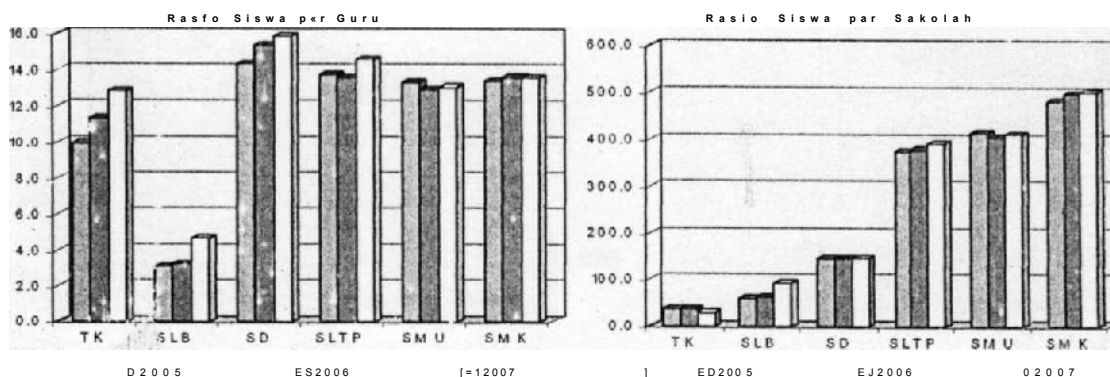
Gambar 2.5. Angka Partisipasi Sekolah tingkat Dasar dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 s.d 2006



Sumber data : BPS Kab.Purworejo

Rasio siswa per guru mengalami peningkatan pada semua tingkat pendidikan kecuali pada Sekolah Menengah Kejuruan. Demikian pula untuk angka rasio siswa per sekolah. Hal ini mengindikasikan telah terjadi peningkatan rasio layanan baik tenaga pengajar maupun jumlah sekolah. Namun demikian keduanya relatif masih berada dalam ambang batas standar pelayanan minimum.

Gambar 2.6 Rasio Siswa per Guru dan Rasio Siswa per Sekolah



Sumber data : Dinas Pendidikan Kab.Purworejo

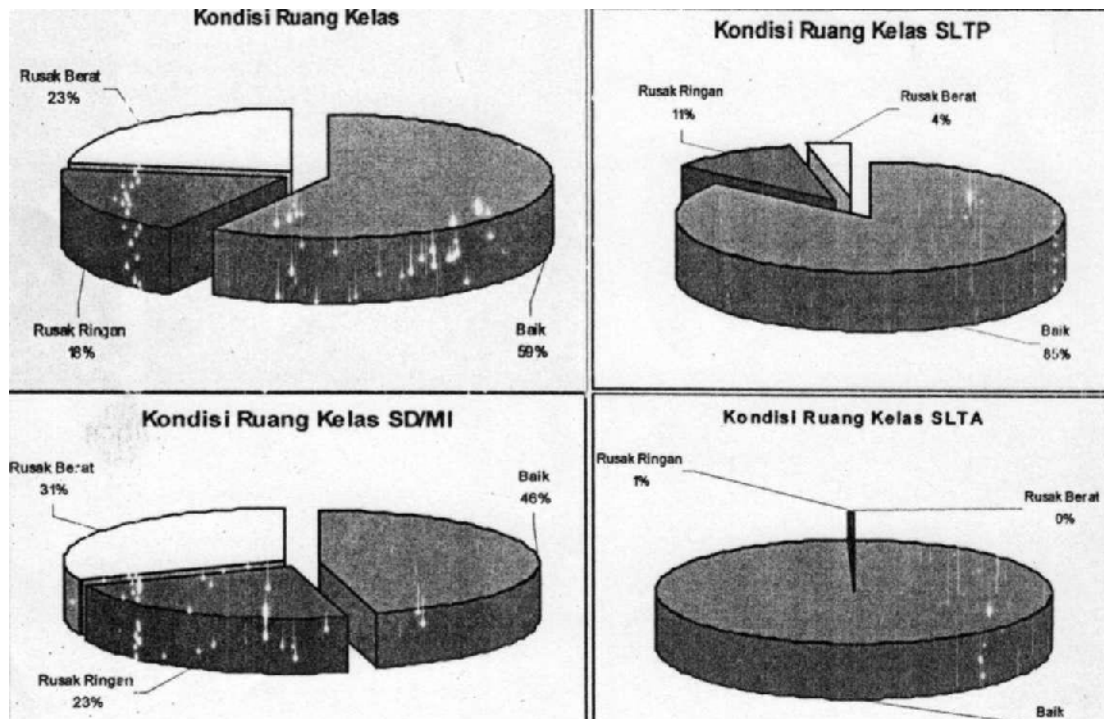
Peningkatan rasio layanan bagi tenaga pengajar maupun sekolah menuntut adanya upaya-upaya peningkatan kapasitas layanan terutama dari sisi

kualitasnya, dengan demikian dapat meningkat pula kualitas keluaran dari pelayanan bidang pendidikan.

Program peningkatan sarana prasarana pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai sumber dana APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN ternyata belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah yang ada. Sampai dengan tahun 2007 kondisi sarana prasarana sekolah terutama ruang kelas untuk seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Purworejo swasta maupun negeri masih terdapat yang rusak berat 23 % dan rusak ringan 18 %, sementara sisanya yaitu 59% berada dalam kondisi baik. Besarnya prosentase rusak berat dan rusak ringan terutama pada tingkat Sekolah Dasar Negeri. Sementara untuk SLTP maupun SLTA sebagian besar berada dalam kondisi baik.

Untuk tingkat SD/MI swasta dan negeri yang rusak berat berjumlah 909 unit ruang kelas yang tersebar dalam 556 sekolah atau 31%, sementara yang rusak ringan ada 23 %. Untuk tingkat SLTP 4 % rusak berat, 11 % rusak ringan dan 85 % dalam kondisi baik. Pada tingkat SLTA 1 % rusak ringan dan 99 % dalam kondisi baik.

Gambar 2.7. Kondisi Ruang Kelas SD/MI, SLTP dan SLTA Kabupaten Purworejo Tahun 2007.



Sumber data : Dinas Pendidikan Kab.Purworejo

Kapasitas pelayanan bidang kesehatan dari sisi kuantitas cenderung tetap dan terdapat beberapa yang mengalami penurunan. Sampai dengan tahun 2007 jumlah posyandu mengalami penurunan sementara jumlah puskesmas, poliklinik maupun pustu tetap. Di sisi lain jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan mengalami peningkatan, dengan demikian rasio beberapa sarana pelayanan kesehatan tersebut mengalami penurunan secara relatif terhadap jumlah penduduk.

Tabel 2.1 Perkembangan Pelayanan Bidang Kesehatan kabupaten Purworejo Tahun 2005 s.d 2007.

	Uraian	2005	2006	2007
1.	Angka kelangsungan hidup bayi (Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun wktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama)	3.25	9.36	8.56
2.	Prosentase Balita Gizi Buruk	0.77%	1.14%	0.84%
	Jumlah balita gizi buruk	347	526	412
	Jumlah balita	45,232	46,126	49,292
3	Rasio Posyandu per Satuan Balita	36,39	37,61	33,03
	- Jumlah posyandu	1.646	1.735	1.628
	- Jumlah balita	45.232	46.126	49.292
4	Rasio Puskesmas. Poliklinik. Pustu per Satuan Penduduk	0,29	0,29	0,29
	- Jumlah Puskesmas, poliklinik, pustu	222	222	222
	- Jumlah penduduk	774.285	776.452	778.512
5	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,12	0,12	0,12
	- Jumlah rumah sakit	9	9	9
	- Jumlah penduduk	774.285	776.452	778.512
6	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	0,20	0,22	0,24
	- Jumlah dokter	154	172	183
	- Jumlah penduduk	774.285	776.452	778.512
7	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	0,91	1,01	1,27
	- Jumlah tenaga medis	702	787	991
	- Jumlah penduduk	774.285	776.452	778.512

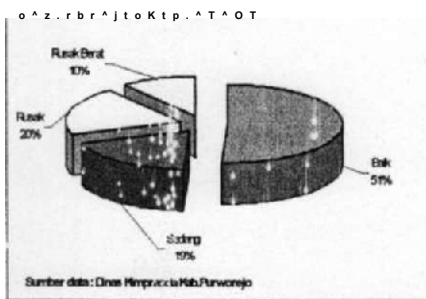
Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Purworejo

Namun demikian kapasitas pelayanan yang ditandai dengan keberadaan para petugas medis dan paramedis mengalami peningkatan dari sisi kuantitas. Hal ini sangat mendukung upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2007 terjadi penurunan jumlah kematian bayi usia di bawan 1 tahun serta penurunan pada jumlah balita penderita gizi buruk. Indikator-indikator

tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian peningkatan usia harapan hidup yang merupakan salah satu ukuran standar dalam pencapaian kualitas pembangunan manusia. Tabel 2.1 menunjukkan beberapa indikator-indikator tersebut.

Kapasitas pelayanan bidang infrastruktur mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2007. Pencapaian tersebut relatif berdasarkan capaian yang telah dikerjakan / difasilitasi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Namun demikian upaya peningkatan akses transportasi terutama untuk penanganan jalan poros desa dan jembatan desa masih sangat terkendala.



Gambar 2.8 menunjukkan kondisi jalan Kabupaten Purworejo sampai dengan akhir tahun 2007, 51 % sudah dalam kondisi baik, 10 % rusak berat, 20 % rusak ringan, dan 19 % dalam kondisi sedang. Keseluruhan presentase tersebut dari 764,35 km total panjang jalan Kabupaten.

Kapasitas pelayanan bidang pengairan terkait dengan kondisi saluran irigasi, bendung maupun bangunan air yang ada sampai dengan tahun 2007. Tabel 2.2 menunjukkan kondisi bangunan-bangunan tersebut, yang keberadaannya akan sangat berpengaruh pula dengan produktivitas sektor pertanian dan berkaitan pula dengan ketahanan pangan daerah.

Tabel 2.2 Kondisi Saluran Irigasi, Bendung dan Bangunan Air di Kab.Purworejo Tahun 2007

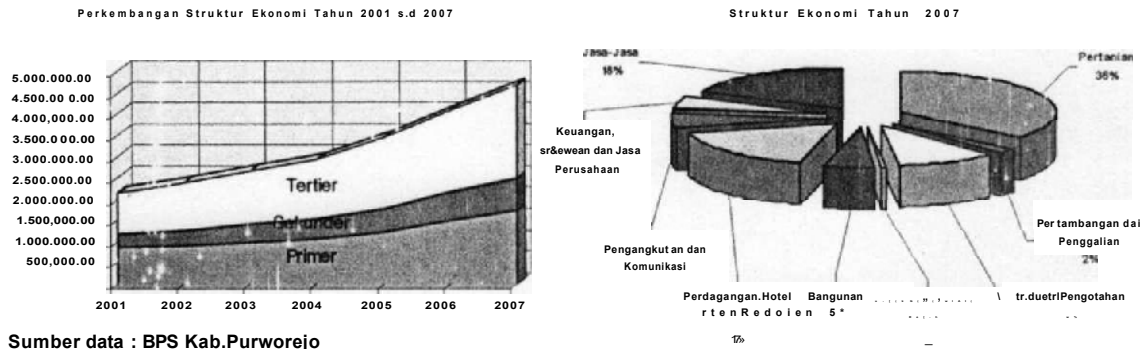
No	Bangunan / Kondisi	2007
1.	Saluran Irigasi (km)	502,205.90
	a. Baik	200,889.90
	b. Sedang	75,350.50
	c. Rusak ringan	100,431.00
	d. Rusak Berat	125,531.50
2.	Jumlah Bendung (buah)	49
	a. Baik	2
	b. Sedang	7
	c. Rusak	31
	d. Rusak Berat	9
3.	Jumlah Bangunan Air (buah)	2,573
	a. Baik	1,029
	b. Sedang	388
	c. Rusak	523
	d. Rusak Berat	633

Sumber data : Dinas Pengairan Kab.Purworejo

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah sebenarnya meliputi berbagai hal, namun kali ini tinjauan diberikan pada aspek yang fundamental saja yaitu kemampuan ekonomi daerah, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Alam. Struktur ekonomi Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2007, apabila dipetakan dalam 9 sektor PDRB maka sektor dominan adalah pertanian yaitu 36 %; apabila dipetakan dalam 3 sektor utama maka sektor primerv'*agriculture* (37%) ada pada posisi kedua setelah sektor tertier/services (47%). Sementara sektor sekunder (*manufacture*) sebesar 16 persen. Dari struktur ekonomi sebagaimana tersebut maka tampak bahwa Kabupaten Purworejo adalah daerah pertanian yang bergerak ke sektor jasa.

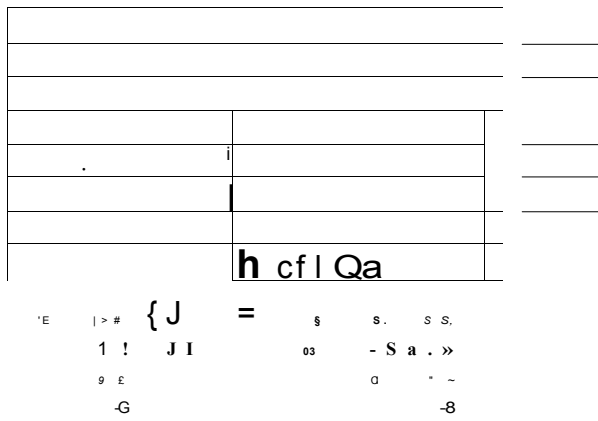
Gambar 2.9 Struktur ftonomi Kabupaten Purworejo (berdasar PDRB atas dasar harga berlaku)



Sumber data : BPS Kab.Purworejo

Fenomena yang muncul dalam struktur ekonomi ternyata seiring dengan fenomena produktivitasnya. Peningkatan produktivitas terjadi pada sektor

Gambar 2.10 Produktivitas sektor PDRB Kab.Purworejo Th. 2005 t.d 2006



Sumber data : BPS Kab.Purworejo (diolah) [32005

Diperlukan upaya-upaya untuk makin memperkuatnya sehingga benar-benar mampu menjadi sektor penggerak perekonomian daerah.

pertanian, keuangan serta jasa. Produktivitas ini dihitung dari nilai tambah produksi per tenaga kerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor - sektor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi daerah dari sisi produksi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2009

Dari sisi sumber daya manusianya maka kapasitas yang dimiliki daerah cukup memadai, dimana jumlah penduduk yang berada pada usia produktif yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan jauh lebih besar dari penduduk usia tidak produktif. Hal ini tampak dalam angka rasio ketergantungan yang berkecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 sebesar 10 orang penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 21 orang usia produktif, kemudian pada tahun 2006 10 orang penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 22 orang usia produktif.

Tabel 2.3 Penduduk Usia Produktif, Tidak Produktif dan Angka Ketergantungan di Kab.Purworejo Tahun 2005 s.d 2006

	2005	2006
Penduduk usia <15 tahun + usia >64	270,838	265,546
Penduduk usia 15-64	591,606	603,483
Rasio Ketergantungan	1 : 2,18	1 : 2,27

Sumber data : BPS Kab.Purworejo (diolah)

2.2. Kinerja SKPD Pengelola Kegiatan

Secara umum kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2007 yang telah direncanakan sebelumnya capaiannya kurang dari 100 %. Hal ini mengindikasikan berbagai hal, diantaranya :

- telah berkembang sikap kehati-hatian dalam menggunakan APBD sehingga menghindari pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya mengalami kesulitan dalam pertanggungjawabannya
- Di sisi lain, pada beberapa SKPD mengalami kendala teknis terkait dengan pengelolaan pelaksanaan kegiatan, diantaranya : administrasi keuangan, penjadwalan pelaksanaan kegiatan, khusus untuk dana bersumber APBN terdapat beberapa yang tidak terealisasi dan sebagian lainnya mengalami keterlambatan pencairan .
- Masih terdapat keterbatasan kemampuan SDM dalam perencanaan serta pengelolaan teknis kegiatan (penyusunan tolok ukur, rencana capaian kinerja, penentuan sasaran, maupun jadwal pelaksanaan kegiatan) yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam mencapai output maupun outcomenya.

Tabel. 2.3 Realisasi capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Purworejo Th.2007.

No	SKPD	%
1	Bagian Hukum Setda	98.66
2	Bagian Organisasi Setda	98.20
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	85.77
4	Bagian Umum Setda	90.76
5	Bagian Pemerintahan Setda	92.90
6	Bagian Pemdes Setda	96.33
7	Bagian Perekonomian Setda	94.73
8	Bagian Bina Program	81.75
9	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	98.39
10	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	97.62
11	Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah	95.43
12	Dinas Pengairan	86.22
13	Dinas Perhubungan	89.93
14	Dinas Pendidikan	92.29
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	86.57
16	Dinas Pertanian dan Peternakan	94.08
17	Dinas Pariwisata	93.76
18	Dinas Perind., Perdagangan, Pertambangan Energi dan Penanaman Modal	98.95
19	Dinas Kesehatan	93.55
20	Dinas Kehutanan	96.32
21	Badan Pengawasan Daerah	96.65
22	Badan Perencanaan Daerah	85.79
23	Badan Informasi dan Komunikasi	97.19
24	Badan Kepegawaian Daerah	92.69
25	Badan Pengelola Keuangan Daerah	74.47
26	Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan	98.15
27	Kantor Kelautan dan Perikanan	95.45
28	Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	89.66
29	Satuan Polisi PaP	76.35
30	Kesbang Linmas	80.98
31	Setvvan	72.39
32	Rumah Sakit Umum	94.45
33	Kecamatan	94.54
	Rata - rata	91.24

BAB III

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN RINGKASAN PENDANAAN KABUPATEN PURWOREJO

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 Kabupaten Purworejo memberikan gambaran ekonomi makro regional tahun 2009 dengan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun sebelumnya, dan kondisi umum perekonomian Nasional maupun perekonomian Propinsi Jawa Tengah.

3.1. Kondisi Ekonomi Regional

Perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan pada triwulan I-**2008** mengonfirmasi terjadinya perlambatan ekonomi nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi hampir di seluruh wilayah. Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat terutama didorong oleh menurunnya kegiatan konsumsi dan ekspor, sedangkan pertumbuhan investasi yang terbatas belum mampu sepenuhnya mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Melambatnya konsumsi disebabkan oleh daya beli masyarakat yang tidak sekuat periode sebelumnya.

Perkembangan inflasi daerah selama triwulan I-2008 secara umum menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dari 45 kota yang dihitung pergerakan inflasinya, 25 kota mengalami inflasi di atas inflasi nasional. Meningkatnya tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga barang pada kelompok bahan makanan dan makanan jadi, diantaranya tepung terigu, minyak goreng, tahu, tempe, dan daging ayam. Faktor yang mempengaruhi peningkatan inflasi di daerah terutama berasal dari imported inflation dan shock (gangguan) pasokan. Kenaikan harga minyak dunia dan harga beberapa komoditas di pasar internasional merupakan faktor penyebab imported inflation, sedangkan kerusakan jalan, banjir, dan buruknya cuaca merupakan faktor penyebab gangguan pasokan.

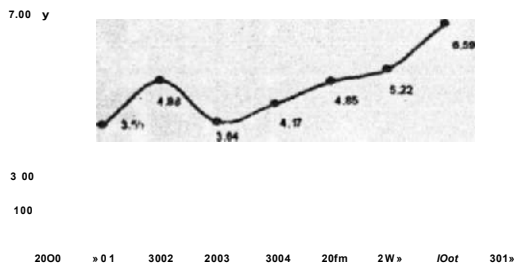
Pentingnya mencapai sasaran inflasi di tengah potensi risiko tekanan inflasi ke depan menyebabkan diperlukan koordinasi kerjasama para pemangku kepentingan di daerah untuk turut mendukung pencapaian sasaran inflasi.

Pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi nasional untuk tahun 2008-2010 berturut-turut sebesar 5%, 4,5%, dan 4% dengan deviasi masing-masing +/- 1%. Sasaran tersebut relatif memerlukan usaha yang lebih keras mengingat potensi-potensi yang dapat mendorong inflasi sepanjang 2008-2010 masih cukup besar, di antaranya adalah tingginya harga komoditas internasional, inflasi di negara mitra dagang, dan masih terjadinya gangguan pasokan berupa kelangkaan supply dan kelancaran distribusi.

3.2. Kondisi Ekonomi Kabupaten Purworejo

Salah satu indikator perkembangan ekonomi adalah perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik menurut harga berlaku maupun harga konstan Tahun 2000.

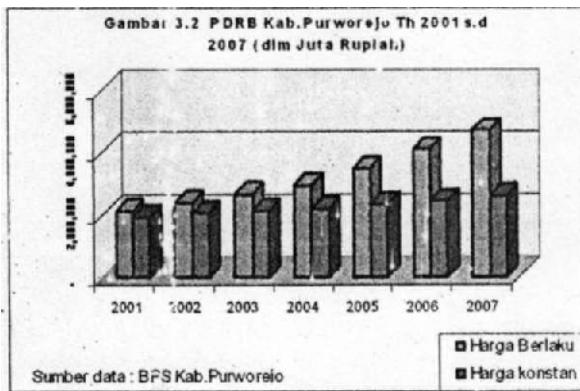
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2001-2007



Sumber data : BPS Kab.Purworejo

Perkembangan perekonomian lima tahun terakhir (2002-2006) di Kabupaten Purworejo menunjukkan kondisi yang menggembirakan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2001-2007 dapat digambarkan dalam gambar 3.1.



Sumber data : BPS Kab.Purworejo

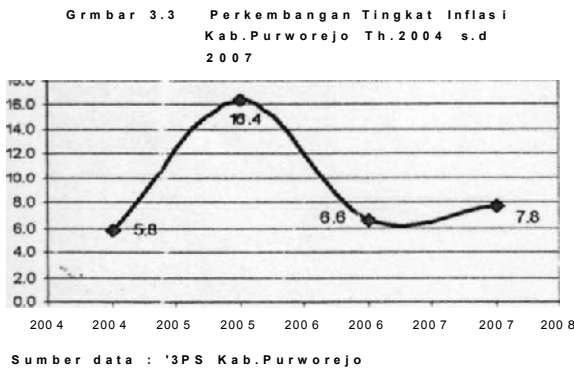
Nilai PDRB Kabupaten Purworejo selama Tahun 2001-2007 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Tahun 2000 terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB itu tampak dalam gambar 3.2.

Jika ditinjau menurut komponen penggunaan, komponen terbesar PDRB Kabupaten Purworejo digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga (69,89 %). Sisanya

digunakan untuk konsumsi lembaga swasta nir laba (2,91 %), pengeluaran pemerintah (14,85 %), pembentukan modal tetap bruto (17,89 %) ; dan ekspor - impor netto (-5,55 %).

Selama 5 (lima) tahun terakhir (2002 s.d 2006) komponen pengeluaran konsumsi meningkat sebesar 84,03%, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba meningkat sebesar 109,88%, pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 78,71%, pembentukan modal tetap bruto meningkat sebesar 124,94 % dan pengeluaran untuk ekspor dan impor meningkat sebesar 85,65 %.

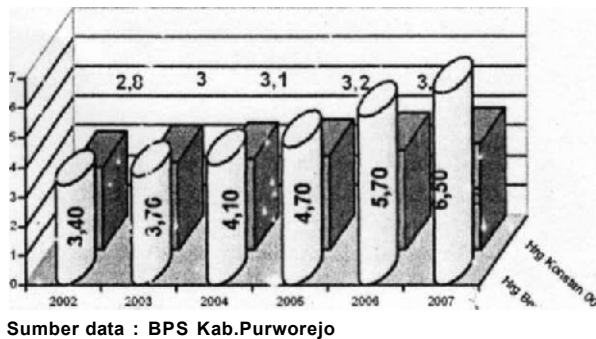
Stabilitas ekonomi daerah yang ditandai dengan perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat sampai dengan tahun 2007.



Pada tahun 2004, laju inflasi di Kabupaten Purworejo ini mulai meningkat dengan angka sebesar 5,8 persen, pada Tahun 2005, tingkat inflasi meningkat lagi dengan angka yang cukup tinggi yaitu mencapai 16,4 persen. Tahun 2006 turun menjadi 6,6 persen kemudian meningkat lagi

menjadi 7,8 persen pada tahun 2007.

Gambar 3.4. PDRB Per Kapita Kab. Purworejo Menurut Harga Berlaku & Harga Konstan 2000 (Juta Rp) , hn 2002 s.d 2007.



Seiring dengan semakin meningkatnya kecenderungan pertumbuhan ekonomi daerah dan terkendalinya perkembangan harga barang-barang (tingkat inflasi), maka tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo juga mengalami peningkatan. Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat

adalah PDRB per kapita, baik menurut harga konstan Tahun 2000 maupun harga berlaku. Nilai PDRB per kapita menurut harga berlaku pada Tahun 2002 adalah sebesar Rp. 3.366.700,00 dan terus meningkat dari tahun ke tahun sampai menjadi sebesar Rp. 6.526.060,00 pada Tahun 2007

Perkembangan sektor riil dan berbagai dampaknya pada kesejahteraan masyarakat itu tidak dapat dilepaskan dari peranan investasi dan tersedianya fasilitas perdagangan di Kabupaten Purworejo. Pada Tahun 2007 jumlah pasar di Kabupaten Purworejo mencapai jumlah sebesar 27 unit, 18 unit KUD dan 168 unit koperasi yang masih aktif.

Investasi di bidang industri didukung dengan program pengembangan industri rumah tangga (non formal), industri kecil dan menengah sebagai bentuk keberpihakan pada UMKM. Sedangkan investasi di bidang perdagangan didukung dengan program pengembangan dan pembinaan usaha daerah, program pengembangan koperasi dan pengusaha kecil serta penyertaan modal BUMD. Program-program dimaksud merupakan perwujudan keberpihakan pemerintah pada UMKM dan koperasi dalam upaya pencapaian kemandirian ekonomi dan keuangan daerah yang bertumpu pada kemampuan daerah.

3.3. Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Tahun 2008

Kondisi dan perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Purworejo tidak dapat terlepas dari prospek perekonomian secara regional dan nasional. Berdasarkan rancangan rencana kerja pemerintah pusat, gambaran ekonomi Indonesia tahun 2009 kedepan akan dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal sebagai berikut: **Pertama**, semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.

Kedua, meskipun kemungkinan timbulnya krisis keuangan dunia maupun regional menurun, potensi ketidakpastian eksternal tetap ada yang antara lain berasal dari kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri paling maju (terutama Amerika Serikat dan Jepang) dengan tingginya harga minyak bumi, perubahan kebijakan moneter di negara-negara industri maju dari kebijakan moneter yang longgar kepada kebijakan moneter yang lebih ketat, serta menurunnya arus penanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa negara Asia.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut: **Pertama**, ekspektasi masyarakat tetap kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan sejak terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum pada Tahun 2004. Ekspektasi tersebut tercermin antara lain dari membaiknya peringkat utang Indonesia dan tidak dimasukkannya lagi Indonesia dalam daftar hitam negara pencucian uang. Meningkatnya peringkat Indonesia ini akan berpengaruh pada penurunan resiko untuk melakukan investasi di Indonesia termasuk sampai di daerah. **Kedua**, pemerintahan yang kuat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi. **Ketiga**, sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, juga meningkat. **Keempat**, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Pada tingkat daerah, perkembangan perekonomian juga dipengaruhi oleh agenda politik daerah yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Faktor kekuatan internal lain yang diduga akan ikut mewarnai perkembangan pengelolaan keuangan daerah khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya, yaitu antara lain:

1. Terbitnya serangkaian Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan otonomi daerah, seperti : PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Peraturan perundangan pelaksanaan itu memantapkan implementasi otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota;

2. Potensi sumberdaya alam, kegiatan sosial ekonomi yang terus meningkat menjadi sumber-sumber keuangan daerah yang cukup potensial dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.;
3. Pembenahan birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik, orientasi pelayanan prima memungkinkan daerah Kabupaten Purworejo untuk dapat menarik investor sebanyak-banyaknya ;
4. Potensi dan daya tarik alam yang cukup indah dengan atraksi budaya yang variatif, menjadikan Kabupaten Purworejo menjadi alternatif daerah tujuan wisata yang menarik;
5. Ketersediaan sarana prasarana perekonomian, fasilitas perbankan dan lembaga keuangan lain memungkinkan dunia usaha lebih maju dan terpenuhinya kebutuhan barang dan dafia masyarakat secara lebih baik;
6. Jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purworejo yang cukup tersedia, ditunjang dengan fasilitas pendidikan dan ketrampilan yang cukup tersedia atau relatif dekat dengan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan lainnya, memungkinkan memacu produktivitas yang tinggi bagi kegiatan produksi di daerah ini.

3.4. Tantangan Utama

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Purworejo serta mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal dan internal sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah pada masa yang akan datang dihadapkan pada beberapa tantangan utama, yaitu antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan bukan saja meningkatkan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Sehingga unsur pemerataan terhadap kegiatan pembangunan beserta hasil-hasilnya menjadi semakin penting untuk diperhatikan.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih; ditandai dengan masih awalnya peningkatan investasi dan

ekspor non-migas dan masih banyaknya kendala di daerah yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan.

3. Menjaga Stabilitas Ekonomi.

Tantangan ini berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari dampak perkembangan ekonomi nasional, maupun perkembangan ekonomi regional dan lokal secara langsung. Perkembangan harga yang stabil di daerah akan mendorong perkembangan produksi secara signifikan sehingga iklim berinvestasi menjadi lebih kondusif.

3.5. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Pada tahun 2009, kebijakan ekonomi makro daerah Kabupaten Purworejo diarahkan untuk menjawab tantangan utama perekonomian ke depan yaitu dengan mengarahkan kebijakan pada: upaya Meningkatkan Kualitas dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah serta tetap menjaga Kestabilan Harga dalam rangka meningkatkan Penyediaan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat serta mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan.

Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dengan keberpihakan kepada UMKM yang berorientasi pada pasar ekspor. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan ikut serta mendorong mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan kepabeanan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha.

Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan UMP agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas

tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja.

Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan pemantauan perkembangan harga. Stabilitas ekonomi dalam masa mendatang juga akan didukung dengan semakin menguatnya perkembangan jasa keuangan di daerah.

3.6. Sasaran Pembangunan Ekonomi Tahun 2009

Dengan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Purworejo di atas, sasaran ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2009 adalah:

1. Meningkatkan usaha-usaha penanggulangan kemiskinan,
2. Meningkatkan upaya-upaya memperluas lapangan kerja,
3. Menjaga stabilitas harga, sehingga terjangkau oleh daya beli masyarakat,
4. Meningkatkan peluang investasi untuk pembiayaan pembangunan

3.7. Arah Kebijakan Anggaran Tahun 2009

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah utamanya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selain Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu, disebutkan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyusunan APBD berdasarkan peraturan perundangan tersebut secara tegas dinyatakan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai. Walaupun tidak tegas secara eksplisit dinyatakan dalam

753.935.871.635,00 dengan rincian berasal dari PAD sebesar Rp. 49.867.770.624,00 (berdasarkan elastisitas PAD terhadap PDRB / pergerakan ekonomi wilayah) dana perimbangan sebesar Rp. 668.652.174.837,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan mencapai jumlah Rp. 35.415.926.173,00. Jika diperhatikan dari komposisi masing-masing sumber pendapatan daerah tersebut, nampak bahwa PADy merupakan bagian pendapatan yang relatif kecil. Namun demikian pada era otonomi daerah ini, peran PAD senantiasa menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan mereka melaksanakan otonomi daerah. Peningkatan PAD dari tahun ke tahun itu menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan keuangannya untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

3.7.2. Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah Kabupaten Purworejo dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2007 belanja daerah Kabupaten Purworejo ditetapkan sebesar Rp. 618.099.103.380,00 dan pada Tahun 2008 dianggarkan lebih meningkat menjadi sebesar Rp 710.537.459.658,00.

Tabel .3.1 APBD Kab.Purworejo Tahun 2007 & 2008 (Rp)

U R A t A N	2007	2008
PENDAPATAN DAERAH		
1.1 Pendapatan Asli Daerah	39.899.182.678	39.590.483.226
1.2 Dana Perimbangan	537.747.374.709	602.389.346.700
1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah	26.308.689.700	32.196.296.521
Jumlah Pendapatan Daerah	603.955.247.087	674.176.126.447
BELANJA DAERAH		
2.1 Belanja Tidak Langsung	429.650.303.945	499.156.033.713
2.2 Belanja Langsung	188.448.799.435	211.381.425.945
Jumlah Belanja	618.099.103.380	710.537.459.658

Berdasarkan assesment awal atas kebutuhan belanja yang diajukan melalui rencana kegiatan SKPD terkait maka terjadi peningkatan kebutuhan untuk tahun 2009. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan diperkirakan akan mencapai Rp. 284.025.821.579,00 sementara bantuan diperkirakan akan mencapai jumlah sebesar Rp 66.765.627.700,00 atau mengalami peningkatan kurang lebih 20 persen.

Pendanaan untuk rencana program dan kegiatan Kabupaten Purworejo tahun 2009 terutama yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersumber dari : APBD Kabupaten Purworejo. APBD Propinsi Jawa Tengah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Komposisi masing-masing sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2 Ringkasan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009 Berdasar Urusan.

NO	URUSAN (Permendagri 59 Thn 2007)	Pagu Indikatif			
		APBD		APBDPROP	APBN
		KEGIATAN	BANTUAN		
1	2	3	4	5	6
	NON URUSAN	17.921.249.893		-	-
	URUSAN W M B				
1	pendidikan;	24.798.322.000	41.764.883000	10453.800000	65570.589500
2	kesehatan;	47.550.601.546	-	-	6.509.790.000
3	pekerjaan urun;	87.912485.000	-	1.200.000.000	9.584.262000
5	penaiaan ruang;	855.000.000	-	-	-
6	perencanaan r^T tangunan;	3.426.711.000	-	50.000.000	-
7	pertiObungan;	1.926500.000	-	-	-
8	linyungan hidup;	410.000.000	-	-	745000000
g	Bertarahan	685.000.000			
10	kepertrjdukan dan catatan sip'l;	1.007.452.650	-	-	-
11	pemberdayaan pererrpuan dan perlindungan anak;	1.840.000.000			
12	keluarga berencana&keluarga sejahtera;	1.360.648.400	-	-	-
13	sosal;	524.000.000	-	-	-
14	ketenagakerjaan;	1.070.000.000	-	-	-
15	koperasi dan usaha kecil dan menengah;	1.395.206.500	-	-	-
16	penanaman modal;		-	-	-
17	kebudayaan;	1.017.500.000		-	-
18	kepemudaan dsn dan raga;	904.500.000	-	-	-
19	kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;	3.218.000.000	-	-	-
20	otonomi daerah, pemerintahan umum, aahiristrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persardan;	42480.607.940			
21	ketahanan pangan;				
22	pen-berdayasan masyarakat&desa;	17.688.451.650	25000.744.700	-	13.612360.000
23	statistik;	410.000.000	*	-	-
24	kearsipan;	891.280.000	-	-	-
25	kommunikasi dan infctmatika;dan	1.620.500.000	-	-	-
26	perpustakaan	613.803.000	-	-	-
	TOTAL URUSAN WAJIB	243.634.571.686	66.765.627.700	11.703.800.000	96.022.001.500
	URUSAN RUHAN				
1	Pertanian;	8.611.000.000	-	752.500.000	8.473.000.000
2	Kehutanan;	1.731.000.000	-	-	300.000.000
3	Energi dan surrter daya rrineral;	625.000.000	-	-	-
4	Pariwisata;	7.218.000.000	-	-	-
5	Kelautan dan perikanan;	1.600.000.000	-	-	1.400.000.000
6	Perdagangan;	1.959.000.000	-	-	-
7	Industri; dan	376.000.000	-	-	-
8	Ketransrrigrasian.	350.000.000	-	-	-
	TOTAL URUSAN PILIHAN	22470.000.000		752.500.000	10.173.000.000
	TOTAL NON URUSAN + URUSAN W M B + RUHAN	284.025.821.579	66.765.627.700	12456.300.000	106.195.001.500

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009

4.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2009

Menghadapi Tahun Anggaran 2009, di Tingkat Nasional masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan. Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 prioritas pembangunan nasional pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- 2) Memperluas penciptaan lapangan kerja, karena jumlah pengangguran masih cukup besar bahkan bertambah terus.
- 3) Keberlangsungan investasi dan daya saing ekspor
- 4) Meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dalam arti luas.
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
- 6) Mendorong peran masyarakat luas dalam menegakan hukum untuk memberantas korupsi serta mempercepat birokrasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 7) Meningkatkan rasa aman, kekuatan pertahanan, penanganan gangguan dan ancaman konflik horisontal.
- 8) Meningkatkan penanganan bencana dan penanggulangan penyakit menular serta ancaman terorisme.
- 9) Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi pembangunan dan kesenjangan antar wilayah.

4.2. Prioritas pembangunan Propinsi Jawa Tengah Th 2009

Rencana Strategis (Renstra) 2003-2008, telah berakhir pada Tahun 2008 ini, oleh karena itu guna menyematani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah, Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2007 tentang Program Indikatif Tahun 2009 yang merupakan pedoman penyusunan RKPD tahun 2009.

Kondisi Jawa Tengah saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum tuntas dan perlu mendapatkan prioritas penanganan pada tahun 2009, di antaranya adalah:

- (1) Menanggulangi kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan;
- (2) Meningkatkan kualitas SDM, kesehatan, pelayanan sosial dasar, kapasitas dan produktivitas kerja serta perumahan dan permukiman;
- (3) Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah guna mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- (4) Melakukan penataan dan pemanfaatan ruang, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan termasuk pengurangan potensi ancaman bencana;
- (5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan kapabilitas aparatur serta penegakan hukum.

Meskipun diyakini bahwa situasi perekonomian pada Tahun 2009 akan lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena faktor internal (dalam negeri) dan eksternal (global) yang diperkirakan masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal. Tantangan internal antara lain terbatasnya sumber-sumber pendapatan baru dalam rangka pembiayaan pembangunan, penanggulangan bencana, penanggulangan berbagai penyakit, tuntutan upah ketenagakerjaan dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan ekonomi global, melambatnya perekonomian negara-negara maju sebagai akibat kecenderungan naiknya harga minyak dunia.

4.3. Prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2009

Masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi Kabupaten Purworejo pada Tahun 2009, di antaranya adalah:

1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat adalah telah terjadi peningkatan pendapatan perkapita namun distribusinya

belum merata, masih terdapat kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah

2) Aspek Pelayanan

Pelayanan publik dasar diantaranya adalah pendidikan, kesehatan serta sarana prasarana / infrastruktur wilayah walaupun selalu diupayakan perbaikannya, namun masih menghadapi beberapa masalah terkait kualitas serta distribusi layanan, sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya akses masyarakat atas layanan pendidikan yang berkualitas
- b. Masih terbatasnya akses dan kapasitas pelayanan bidang kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.
- c. Kapasitas dan kualitas layanan sarana prasarana infrastruktur daerah yang masih terbatas (jalan - jembatan, irigasi, drainase, perdagangan, pariwisata, listrik, air bersih)

3) Daya Saing Wilayah

- a. Kapasitas ekonomi daerah yang sampai dengan akhir 2007 digerakkan terutama oleh sektor pertanian dan jasa masih perlu peningkatan produktivitas terutama pada sektor pertanian yang sharenya selalu terbesar agar dapat benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai salah satu modal dasar pembangunan di Kabupaten Purworejo sangat potensial untuk pembangunan karena sebagian besar berada pada usia produktif, namun efektivitasnya bagi pembangunan daerah masih menjadi tantangan.
- c. Potensi sumber daya alam yang dimiliki masih terkendala dalam upaya optimalisasinya bagi pengembangan daerah.

4) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai agen pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta ujung tombak pelayanan kepada masyarakat masih menghadapi kendala-kendala dalam optimalisasi tugas-tugasnya, diantaranya adalah :

a. tahap perencanaan;

- terbatasnya ketersediaan data yang relevan dan akurat dalam hal identifikasi permasalahan-permasalahan daerah dan wilayah, termasuk kepastian ketersediaan dana-dana non APBD terutama APBN yang selalu muncul di luar rentang waktu perencanaan daerah, jadi relatif tidak efektif bagi perencanaan di daerah,
- sinergisme perencanaan antar pemerintah pusat dan daerah, antar sektor maupun antar pelaku yang telah terjalin belum cukup efektif dalam kerangka penyelesaian masalah daerah,
- terbatasnya kemampuan aparat dalam perencanaan teknis kegiatan yang relevan dengan masalah, terukur dan berada dalam jangkauan kemampuan penyelesaian sesuai dengan inputnya (waktu, dana dan tenaga)

b. tahap pelaksanaan;

- Koordinasi pelaksanaan kegiatan antar SKPD yang telah terjalin belum cukup efisien dan efektif , jadi masih sering terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dalam hal waktu maupun esensi pelaksanaan kegiatan.
- Perkembangan peraturan mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah diantaranya mengenai penatausahaan keuangan daerah masih menjadi masalah teknis yang dihadapi SKPD, hal ini berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan APBD yang berpengaruh pula terhadap peranan APBD sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.

c. tahap pemantauan, pengendalian maupun pengawasan;

- Upaya-upaya pemantauan, pengendalian maupun pengawasan yang telah dilakukan di dalam jajaran pemerintah daerah belum cukup efektif sebagai upaya konstruksi atau perbaikan pelaksanaan.

Berpijak dari berbagai masalah yang dihadapi daerah maupun pemerintah daerah serta konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah dan tetap memperhatikan kebijakan dari pemerintah pusat maupun propinsi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan distribusi kesejahteraan masyarakat melalui ;
 - upaya penurunan tingkat kesenjangan pendapatan dengan memberikan fasilitasi kepada masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan desa yang didanai melalui APBD, APBD Propinsi , APBN maupun Bantuan Luar Negeri.
 - upaya penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah dengan lebih memperhatikan distribusi lokasi pelaksanaan pembangunan pada tiap urusan daerah yang sesuai dengan masalah di tiap wilayah.
- 2) Meningkatkan kualitas dan distribusi pelayanan publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah.
- 3) Meningkatkan daya saing wilayah, melalui upaya :
 - peningkatan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas melalui program-program revitalisasi pertanian dalam arti luas, agropolitan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah
 - optimalisasi potensi sumber daya alam melalui program-program di bidang pariwisata maupun upaya menarik investor untuk mengelola potensi yang ada.
 - peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui program-program di bidang ketenagakerjaan maupun pendidikan luar sekolah.
- 4) Meningkatkan optimalisasi fungsi perangkat daerah dalam rangka fasilitasi pembangunan maupun pelaksana pelayanan publik, melalui upaya :
 - peningkatan kualitas perencanaan tingkat makro (daerah) maupun mikro (pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah).
 - peningkatan koordinasi perencanaan dengan pemerintah pusat dan propinsi
 - peningkatan kemampuan aparat perangkat daerah dalam pengelolaan kegiatan
 - peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah
 - optimalisasi Tugas pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam melakukan konstruksi terhadap pembangunan daerah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2009

Program dan kegiatan merupakan perangkat teknis yang dibutuhkan guna mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Berpijak pada peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan pembangunan di daerah serta tetap menjaga konsistensinya dengan visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2006-2010, maka program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2009 meliputi program non urusan, program urusan wajib dan program urusan pilihan.

5.1. Program-program non urusan yang ada pada setiap SKPD

Program non urusan muncul sebagai konsekuensi dari adanya perubahan struktur Anggaran Belanja Daerah dimana semua kegiatan yang dilaksanakan SKPD adalah merupakan belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Mengacu pada Permendagri 13 tahun 2006 maka program non urusan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2009 adalah :

- Program pelayan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana prasarana aparatur
- Program peningkatan kapasitas aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.2. Program-program urusan wajib

Program-program urusan wajib adalah program yang berkaitan dengan kewenangan wajib yang dilaksanakan daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2006-2010 maka program-program terkait dengan 26 urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

5.2.1. Urusan Pendidikan

- Pembinaan pendidikan anak usia dini
- Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah
- Fasilitasi pengembangan perguruan tinggi
- Peningkatan kualitas pendidikan non formal
- Peningkatan sarana prasarana pendidikan
- Peningkatan kualitas ketenagaan teknis dan non teknis

5.2.2. Urusan Kesehatan;

- Rehab sarana prasarana kesehatan beserta sarana pendukungnya
- Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan lainnya
- Penyediaan obat untuk masyarakat
- Peningkatan pola hidup bersih dan sehat
- Peningkatan gizi untuk anak
- Peningkatan pelayanan kesehatan kesehatan untuk masyarakat miskin
- Peningkatan pelayanan RSUD
- Peningkatan penelitian dan pengembangan kesehatan
- Peningkatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat
- Peningkatan peran swasta dalam pembangunan kesehatan masy.

5.2.3. Urusan Pekerjaan umum;

- Pengelolaan & pengemb. prasarana & sarana jalan, jembatan & pendukungnya
- Pengelolaan pengemb. gedung, trotoir, air bersih & drainase serta perumahan dan permukiman
- Pengelolaan dan pengembangan kebersihan, pertamanan, limbah, penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya

- Pengelolaan, pengembangan peralatan & laboratorium Pekerjaan Umum
- Pengelolaan dan pengembangan SDA
- Pengelolaan dan pengembangan pelayanan jaringan irigasi
- Pengelolaan & pengembangan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air

5.2.4. Urusan perumahan rakyat;

- Pengembangan perumahan

5.2.5. Urusan penataan ruang;

- Sosialisasi, pengendalian dan penyusunan Perencanaan Tata Ruang Daerah/Kota/Kawasan

5.2.6. Urusan perencanaan pembangunan;

- Sosialisasi dan fasilitasi perencanaan
 - Penyusunan dokumen perencanaan umum
 - Pengendalian dan pelaporan
 - Pemantauan dan evaluasi
 - Koordinasi perencanaan
 - Peningkatan kinerja perencanaan
- Pengkajian penelitian dan pengembangan
- Penyelenggaraan musrenbang desa sampai kabupaten
- Pembinaan masyarakat dalam penyusunan prioritas pembangunan

5.2.7. Urusan perhubungan;

- Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan
- Pengelolaan dan pengembangan pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan
- Pengelolaan dan pengembangan terminal dan perparkiran

- Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana lalu lintas serta angkutan jalan
- Peningkatan pelayanan dan penataan administrasi angkutan

5.2.8. Urusan lingkungan hidup;

- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Peningkatan peranserta masyarakat dan kualitas akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- Pengemb. kapasitas pengelolaan sumberdaya alam & lingkungan hidup
- Peningkatan kerjasama lintas sektor

5.2.9. Urusan pertanahan;

Sosialisasi dan pembinaan penggunaan tanah

- Penertiban tata guna tanah
- Redistribusi tanah obyek land reform
- Pensertifikatan tanah

5.2.10. Urusan kependudukan dan catatan sipil;

- Peningkatan pelayanan prima administrasi kependudukan
- Penyusunan sistem administrasi kependudukan

5.2.11. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- Peningkatan kesadaran kesetaraan gender
- Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak

5.2.12. Urusan keluarga berencana&keluarga sejahtera;

- Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

5.2.13. Urusan sosial;

- Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Pemberdayaan PMKS

- Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial
- Pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan rakyat
- Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pelayanan sarana peribadatan

5.2.14. Urusan ketenagakerjaan;

- Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
- Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan (perlindungan tenaga kerja)

5.2.15. Urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- Peningkatan kualitas kelembagaan UMKM
- Pengemb. Kelompok Usaha Mikro, Mikro Kecil dan Menengah
- Pengembangan permodalan
- Pembinaan & pengemb. koperasi, UMKM serta wirausaha baru

5.2.16. Urusan penanaman modal;

- Penyederhanaan proses perijinan
- Peningkatan akses informasi peluang penanaman modal
- Peningkatan infrastruktur pendukung peningkatan penanaman modal daerah

5.2.17. Urusan kebudayaan;

Pembinaan kebudayaan

5.2.18. Urusan kepemudaan dan olah raga;

- Peningkatan kualitas generasi muda dan olahraga

5.2.19. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- Sosialisasi dan Pembinaan kesadaran berpolitik bagi masyarakat

- Pembinaan lembaga dan tokoh masyarakat dalam mengatasi permasalahan politik
 - Pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara
 - Pembinaan politik
- Antisipasi dan penanggulangan bencana

5.2.20. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

- Penyusunan standar pelayanan umum pelayanan perijinan
- Peningkatan kinerja pelayanan perijinan
- peningkatan sarana prasarana perijinan
 - Sosialisasi masalah perijinan
- Penyusunan kebijakan kepala daerah
- Peningkatan koordinasi satuan kerja perangkat daerah
- Pemantapan pelaksanaan tugas dan Peningkatan Kinerja Setda
- Peningkatan Pelayanan administrasi pemerintahan
- Peningkatan fasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD
- Peningkatan fasilitasi kedudukan dan protokoler DPRD
- Peningkatan fungsi koordinasi pemerintahan kecamatan
- Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa
- Peningkatan pelayanan administrasi masyarakat
- Peningkatan kinerja pemerintahan kecamatan
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
- Identifikasi potensi daerah dalam upaya penggalan sumber PAD
- Peningkatan profesionalisme aparat pengelola keuangan daerah
- Peningkatan fasilitas pengelolaan keuangan daerah

- Pembinaan dan pengawasan BUMD
- Penataan kelembagaan BUMD
- Penguatan modal BUMD
- Peningkatan kualitas SDM pengelola BUMD
- Peninjauan produk-produk hukum
- Penerbitan produk hukum daerah
- Penegakan produk hukum daerah
- Sosialisasi dan penyuluhan hukum
- Pemberian bantuan hukum
- Penataan kelembagaan
- Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas
- Pembinaan aparatur
- Penyusunan standar ketatalaksanaan dinas
- Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimum (SPM)
- Peningkatan ketertiban umum
- Sosialisasi dan pembinaan tramtib
- Peningkatan kinerja Satpol PP
- Pelaksanaan pemeriksaan komprehensif
- Evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Peningkatan kinerja pemeriksaan
- Penyusunan Kerangka kebijakan pengawasan berbasis gugus kendali mutu
- Sosialisasi dan uji coba
- Aplkasi pengawasan berbasis gugus kendali mutu
- Bantuan tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar

- Penyelenggaraan diklat
- Pengelolaan administrasi kepegawaian
- Pembinaan Pegawai

5.2.21. Urusan ketahanan pangan;

5.2.22. Urusan pemberdayaan masyarakat&desa;

- Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa
- Peningkatan sarana prasarana pemerintahan desa
- Penguatan lembaga-lembaga desa
- Peningkatan alokasi dana desa (ADD)
- Peningkatan pendapatan pemerintahan desa
- Peningkatan pengelolaan manajemen fiskal desa
- Pemantapan otonomi desa melalui desentralisasi kewenangan
- Menghidupkan agroindustri dan agribisnis pedesaan
- Menghidupkan pasar-pasar desa
- Peningkatan usaha ekonomi produktif tingkat desa
- Peningkatan peran serta lembaga / kelompok masyarakat desa
- Peningkatan manajemen penanggulangan kemiskinan
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat

5.2.23. Urusan Statistik;

- Statistik Daerah

5.2.24. Urusan kearsipan;

- Perbaikan sistem kearsipan

5.2.25. Urusan komunikasi dan informatika;dan

- Pengembangan informasi dan komunikasi

- Penyediaan data berbasis teknologi informasi
- Peningkatan jaringan antar SKPD
- Pemberdayaan lembaga informasi daerah

5.2.26. Urusan perpustakaan.

- Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

5.3. Program-program urusan pilihan

Program-program urusan pilihan adalah program yang berkaitan dengan kewenangan pilihan yang dilaksanakan daerah. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2006-2010 maka program-program terkait dengan 8 urusan pilihan yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

5.3.1. Urusan Pertanian

- Optimalisasi penyuluhan pertanian
- Peningk.produktivitas tanaman pangan menuju kawasan agropolitan
- Pengendalian tata guna lahan
- Pengendalian hama penyakit tanaman pangan
- Pemanfaatan teknologi tepat guna bidang pertanian
- Optimalisasi penyuluhan perkebunan
- Pengembangan hudidaya perkebunan unggulan dgn pola agribisnis menuju kawasan agropolitan
- Pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan
- Pengembangan pengolahan komoditas perkebunan
- Optimalisasi lahan-lahan potensial perkebunan
- Pendampingan permodalan bagi pembudidaya ternak
- Revitalisasi penyuluhan peternakan
- Pengendalian hama dan penyakit ternak

5.3.2. Urusan Kehutanan

- Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam
- Pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa hutan
- Pengelolaan sumber daya hutan

- Pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan non kayu & jasa lingkungannya
- Revitalisasi penyuluhan kehutanan
- Pengembangan prasarana pemasaran komoditas agribisnis
- Pengembangan agribisnis tanaman non pangan berbasis sumberdaya alam lokal
- Penguatan kapasitas kelembagaan dalam hal permodalan dan kualitas SDM di bid.agribisnis

5.3.3. Urusan Pertambangan dan Energi

- Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan
- Perluasan jaringan listrik pedusunan
- Pengembangan SIG aplikasi pertambangan

5.3.4. Urusan Pariwisata

- Pemasaran dan penyuluhan wisata
- Pengembangan potensi obyek wisata kawasan geger menjangan
- Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana wisata lainnya

5.3.5. Urusan Kelautan dan Perikanan

- Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan
- Penyediaan sarana prasarana produksi ikan laut
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia rumah tangga nelayan
- Pendampingan permodalan bagi kelompok-kelompok masyarakat pembudidaya ikan
- Diseminasi teknologi perikanan
- Pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan budidaya perikanan
- Pembinaan usaha pengolahan produk perikanan

5.3.6. Urusan Perdagangan

- Pengembangan pemasaran produksi daerah
- Bimbingan dan Pembinaan SDM Pedagang Pasar
- Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
- Perwujudan perlindungan konsumen dan tertib niaga

5.3.7. Urusan Perindustrian

- Penumbuhan industri berbasis sumber daya lokal

- Pengembangan teknologi tepat guna bidang industri
- Pengembangan SDM bidang industri
- Pengembangan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah
- Pengembangan Sistem Informasi Industri

5.3.8. Urusan Ketransmigrasian

- Peningk. kesadaran masyarakat akan tujuan & manfaat transmigrasi
- Penyelenggaraan transmigrasi

- Peningkatan manajemen pelayanan pengelolaan ketransmigrasian

5.4. Program prioritas

Dari keseluruhan program-program tersebut dengan tanpa mengabaikan program-program lainnya maka prioritas diberikan terutama kepada program-program yang terkait langsung dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2009 yaitu :

- upaya penurunan tingkat kesenjangan pendapatan dengan memberikan fasilitasi kepada masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan desa yang didanai melalui APBD, APBD Propinsi maupun APBN;
- upaya penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah dengan lebih memperhatikan distribusi lokasi pelaksanaan pembangunan pada tiap urusan daerah yang sesuai dengan masalah di tiap wilayah;
- upaya peningkatan kualitas dan distribusi pelayanan publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah;
- peningkatan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas melalui program-program revitalisasi pertanian dalam arti luas, agropolitan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah;
- optimalisasi potensi sumber daya alam melalui program-program di bidang pariwisata maupun upaya menarik investor untuk mengelola potensi yang ada;
- peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui program-program di bidang ketenagakerjaan maupun pendidikan luar sekolah;
- peningkatan kualitas perencanaan tingkat makro (daerah) maupun mikro (pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah);

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2009

- peningkatan koordinasi perencanaan dengan pemerintah pusat dan propinsi;
- peningkatan kemampuan aparat perangkat daerah dalam pengelolaan kegiatan;
- peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah;
- optimalisasi fungsi pemantauan, pengendalian maupun pengawasan dalam melakukan konstruksi terhadap pembangunan daerah, melalui program-program pemantauan evaluasi, pengendalian pelaporan maupun program-program pengawasan;

Prioritas dalam implementasinya **tidak selalu berupa peningkatan alokasi dana** tetapi **dapat pula berupa penyempurnaan / perbaikan design pelaksanaan kegiatan**, yaitu design yang dapat memaksa pelaksanaan kegiatan terarah menjadi lebih efektif yaitu mengenai pada sasaran atau tujuan yang diharapkan. Upaya ini akan optimal apabila menjadi titik tolak dalam tahap perencanaan berikutnya yaitu perencanaan anggaran dan teknis kegiatan. Secara lebih detail, matrik program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2009 adalah sebagaimana terlampir.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2009, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan melaksanakan program-program RKPD Tahun 2009 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2009 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing instansi pemerintah, perlu menyesuaikan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
3. Pemerintah Daerah, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), dengan mendapatkan masukan dari seluruh SKPD, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKPD Tahun 2009;
4. Pada akhir tahun anggaran 2009, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2009

peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 ini telah disusun dengan seoptimal mungkin melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah daerah, agregasi aspirasi berbagai lapisan masyarakat serta memfokuskan program dan kegiatan kedalam program dan kegiatan yang prioritas segera dilaksanakan. Segenap sumberdaya yang dimiliki dan semangat kerja dari seluruh komponen masyarakat di daerah hendaknya diupayakan untuk dapat mendukung prioritas pembangunan daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan sebagian kecil dari keseluruhan tahapan pembangunan daerah . Mengawali pembangunan melalui sebuah perencanaan pembangunan yang baik menjadi itikad baik pemerintah daerah untuk mengupayakan penyelesaian masalah-masalahnya secara terencana. Harapan berikutnya adalah dapat menjadi titik tolak tahap-tahap berikutnya. Dalam tahapan pelaksanaannya mudah-mudahan dapat menjadi komitmen bersama segenap komponen pembangunan daerah di Purworejo, pemerintah, masyarakat maupun legislative untuk mencapai hasil-hasil yang bermanfaat bagi semua pihak.."

Keberhas'lannya dalam tahap implementasi adalah merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya artikulasi terhadap kebutuhan berbagai pihak. Demikian pula sebaliknya apabila beberapa hal belum berhasil dicapai menjadi komitmen bersama segenap komponen pembangunan daerah untuk memperbaiki / melakukan penyempurnaan - penyempurnaan pada periode berikutnya.

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

